

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Sekolah merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam pelayanan pendidikan dan masuk ke dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah dengan itu tentunya memiliki keterkaitan dalam mengelola keuangan daerah terutama pada pengelolaan dana pendidikan yang sudah dialokasikan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai dengan hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun (2021) dana (BOS) merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan nonpersonalia bagi lembaga pendidikan dasar maupun menengah untuk memenuhi skema wajib belajar. Anggaran dana BOS juga dapat digunakan untuk beberapa keperluan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan BOS pertama kali dilaksanakan pada Juli 2005 dan peraturan terbaru terkait pedoman teknis yang dikeluarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman sekolah dalam menerima dana BOS hingga saat ini. Besaran dana bantuan ditentukan dengan

mengalikan jumlah keseluruhan siswa di setiap sekolah dengan jumlah besaran satuan bantuan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) berikut:

“Besaran alokasi dana BOS ditentukan dengan mengalikan biaya satuan tiap daerah dengan jumlah siswa di sekolah”.

Melalui program dana BOS, sekolah harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap pengalokasian anggaran dana BOS. Dalam satu tahun, penyaluran dana BOS dilakukan melalui tiga tahap setelah sekolah melaporkan penggunaan dana BOS tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan menteri bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus non fisik. Dalam laporan hasil pemeriksaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang bersumber dari Disikpora Provinsi Bali didapatkan bahwa daerah yang paling banyak memperoleh dana BOS adalah Kabupaten Buleleng dengan penerimaan dana sebesar Rp 35.217.813.123 hal ini dikarenakan total lembaga sekolah dasar terbanyak yang berjumlah 466 sekolah yang tersebar di 9 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah SD di Kabupaten Buleleng**

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Buleleng	76
2.	Sukasada	60
3.	Seririt	50

4.	Banjar	59
5.	Grogak	45
6.	Sawan	45
7.	Kubutambahan	45
8.	BusungBiu	45
9.	Tejakula	41
Total		466

(Sumber : kemendikbud)

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, total Lembaga pendidikan SD di Kabupaten Buleleng berjumlah 466 sekolah yang tersebar di 9 Kecamatan. Pada Kecamatan Buleleng total Lembaga pendidikan SD berjumlah 76 sekolah. Pada Kecamatan Sukasada berjumlah 60 sekolah. Selanjutnya, total lembaga pendidikan SD di kecamatan Seririt berjumlah 50 sekolah. Total lembaga pendidikan SD di Kecamatan Banjar berjumlah 59 sekolah. Total lembaga pendidikan SD di Kecamatan Grogak, Sawan, Kubutambahan, Busungbiu masing – masing berjumlah 45 sekolah. Dan Total lembaga pendidikan SD di Kecamatan Tejakula berjumlah 41 sekolah. Banyaknya jumlah lembaga pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Buleleng dan seluruh sekolah dasar telah melaksanakan penggunaan ARKAS yang mendasari pemilihan penelitian ini di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun (2021) pasal 25 disebutkan bahwa pelaporan dan peyampaian perencanaan dana bos dapat dilakukan melalui sistem aplikasi pada kementerian atau disebut dengan ARKAS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan disebutkan bahwa setiap sekolah pada semua jenjang baik Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, baik negeri maupun swasta harus menyusun Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Penelitian ini memilih sekolah dasar sebagai subjek penelitian dikarenakan sekolah dasar memiliki jumlah siswa yang berbeda disetiap tahunnya pada masing-masing sekolah dasar, sehingga jumlah dana BOS yang diterima disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Berbeda dengan Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas yang mana jumlah siswanya rata-rata memiliki jumlah yang sama disetiap tahunnya.

Menurut Bapak I Komang Muliatara salah satu tim pemeriksa dana BOS di Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa mulai Januari tahun 2022 Buleleng merupakan kabupaten pertama yang menerapkan penggunaan ARKAS dan juga sudah terlaksana diseluruh sekolah dasar di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan pertama di Kabupaten Buleleng dikarenakan Buleleng sebagai kabupaten yang telah mendapatkan penghargaan WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga pelaksanaannya digunakan sebagai acuan dari kabupaten lain yang ada di provinsi Bali sebagai kabupaten uji coba dalam penggunaan ARKAS. Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana BOS, organisasi sekolah akan mengalami kesulitan menempatkan dana BOS jika tidak menggunakan aplikasi seperti (ARKAS) (Mashari, 2021). Upaya tim sekolah dalam mengelola dan BOS masih di tempat yang salah, karena manajemen tidak menggunakan metode atau aplikasi yang dapat membantu (Sari *et al.*, 2021).

Suatu metode atau aplikasi yang mendukung agar pelaksanaan manajemen sekolah berjalan dengan lancar, seperti penerapan rencana kerja anggaran sekolah (ARKAS) untuk meningkatkan manajemen sekolah (Setyawan, 2020).

Sekolah wajib menggunakan (ARKAS) sebagai pembimbing dalam pengelolaan dana BOS agar dana BOS dapat dikelola secara efektif serta membantu pengelolaan sekolah (Ridho *et al.*, 2021). Dengan adanya Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS), dana BOS sekolah akan tepat sasaran, dan dana BOS akan dikelola dengan tujuan agar dana BOS lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan sekolah (Sa'idu, 2021). Manajemen sekolah harus mampu mengimplementasikan aplikasi rencana kerja anggaran sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan dana BOS agar dana BOS dapat dipertanggungjawabkan (Yusra *et al.*, 2021).

Temuan studi menunjukkan bahwa jika sistem informasi dana BOS dikelola dengan baik, maka setiap transaksi yang dilakukan akan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS. Sedangkan penelitian Budaya (2017) menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan yang baik akan menjadikan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila dana BOS yang di peroleh digunakan sebagai wadah untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Dalam petunjuk teknis (JUKNIS) 2022 telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS pihak sekolah diwajibkan untuk memiliki tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab dan bendahara sebagai tim pengelola agar pelaksanaan dan penggunaan dana



BOS berjalan dengan anggaran yang telah ditentukan dan tepat sasaran. Adapun untuk dapat menjadi tim pengelola BOS harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya seperti, tim pengelola BOS harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi agar dalam proses perencanaan anggaran dana BOS tidak mengalami kesulitan dalam proses penginputan, selain itu tim pengelola dana BOS harus memahami mengenai akuntansi dalam perencanaan dana agar sesuai dengan JUKNIS yang telah ditetapkan sehingga pos-pos anggaran tidak mengalami kesalahan, dan sebelum penggunaan aplikasi tentunya telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai cara kerja aplikasi yang akan digunakan.

Adapun fenomena yang terjadi dalam penggunaan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu tim pemeriksa BOS kabupaten Buleleng yaitu Bapak I Komang Muliantara M.Pd. menyatakan bahwa terdapat masalah-masalah teknis yang terjadi dalam pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah dasar yang mana sekolah dasar rata-rata tidak memiliki tenaga administrasi khusus sehingga pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, guru sekolah dasar rata-rata tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik sehingga sekolah akan menunjukan guru atau staf tata usaha dalam hal pengelolaan dana BOS. Adanya permasalahan ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada di masing-masing sekolah dasar. Menurut Suryani *et al.* (2020) menyatakan bahwa

sumber daya manusia (SDM) merupakan sebuah unsur vital yang terdapat di dalam organisasi karena kinerja sumber daya manusia menunjukkan terwujudnya visi dan misi dari sebuah organisasi. Menurut Sedarmayanti (2017) menyatakan bahwa kompetensi itu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang digunakan untuk meningkatkan kinerja; atau keadaan/ kualitas yang memadai/sangat berkualitas, mempunyai kemampuan untuk menampilkan peran tertentu. Jadi Kompetensi sumber daya manusia merupakan sebuah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang/individu sebagai bagian dari organisasi agar dapat menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dari sebuah organisasi.

Permasalahan lain dalam penggunaan aplikasi ini masih banyak tim pengelola BOS di masing-masing sekolah dasar yang mengalami kesalahan dalam penginputan dengan itu pentingnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh tim pengelola BOS. Menurut Sudaryono (2012), pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S, 1999) disebutkan bahwa seseorang yang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan.

Selain itu masalah yang terjadi yaitu masih terdapat tim pengelola BOS yang mengalami keterlambatan membuat rencana kegiatan dan anggaran kerja dalam aplikasi. Dengan adanya masalah ini maka penting untuk

melakukan pengawasan terhadap operator pengelola BOS dalam pengelolaan dana BOS. Effendi (2005) memaparkan bahwa tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan megarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal. Salah satu objek yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan adalah perilaku manusia yang membuat lingkungan selalu berubah, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Siegel (1989) bahwa fokus utama subsistem pengawasan keuangan yaitu perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi bukan pada mesin atau peralatan yang digunakan. Adanya masalah yang berkaitan dengan penggunaan sistem ini maka pentingnya kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan aggaran sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Peneliti meneliti topik ini berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyid dan Sumunar (2022) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Sekolah (di Kecamatan Pulogadung dan Jatinegara). Pengembangan penelitian ini modifikasi variabel dependen dan independen, pengembangan penelitian ini dilakukan karena penelitian terdahulu memiliki keterbatasan pada variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pengawasan. Peneliti menambahkan dua variabel independen dalam penelitian ini dikarenakan penelitian terdahulu memiliki keterbatasan hanya menggunakan dua variabel independen sehingga dalam penelitian ini



terdapat tiga variabel independen. Selain itu peneliti juga merubah variabel dependen pada penelitian ini, yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan pengelolaan keuangan sekolah berbeda dengan penelitian ini yang terfokus pada penggunaan aplikasi dalam pengelolaan dana BOS. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu SD sekabupaten Buleleng. Peneliti memodifikasi variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bos agar lebih terfokus terhadap fenomena yang terjadi.

Penggunaan kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana, (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ramadhan (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Variable selanjutnya yaitu pemahaman akuntansi yang mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika, et.al (2019) menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota medan. Selanjutnya untuk variabel pengawasan ini digunakan karena dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2021) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawuntu et.al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian yang digunakan oleh Peneliti yaitu **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada SD Se-Kabupaten Buleleng)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai dalam proses penggunaan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
2. Pemahaman Akuntansi yang dimiliki bendahara BOS yang belum memadai dalam menempatkan pos-pos dana BOS pada penggunaan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
3. Pengawasan yang belum maksimal terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

## **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis terfokus pada permasalahan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan

pengawasan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan objek penelitian dilakukan pada Sekolah Dasar Se-Kabupaten Buleleng. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari ketidaksesuaian pokok permasalahan dengan pemaparan masalah.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan Masalah yang peneliti ajukan yaitu :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS ?
2. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS ?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Bertujuan untuk membuktikan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS
2. Bertujuan untuk membuktikan Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS

3. Bertujuan untuk membuktikan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan dana BOS

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Peneliti berhadap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yakni turut berkontribusi dalam pengembangan teori yang digunakan secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Akutansi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai sarana pengamplikasian teori yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam pengelolaan dana BOS yang didapatkan selama pelaksanaan perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

##### **b. Bagi Sekolah Dasar**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai input terhadap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng

terutama yang berkaitan dengan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

c. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Peneliti berharap hasil yang penulis dapatkan bisa digunakan sebagai rujukan atau sumber bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan topik yang penulis gunakan sebagai subjek penelitian.

